

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A, M. Y. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Abdul, H. (2015). *Auditing : Dasar – Dasar Audit laporan Keuangan* (Kelima ed.). Yogyakarta: Unti Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Asep, H. (2006). *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Bahri, S. (2016). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Yogyakarta: CV. Andi OFFSET.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Djalil, R. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka.
- Glynn, J. (1993). *Public Sector Financial Control and Accounting* (2nd Ed ed.). Oxford: Blackwell.
- Hansen dan Mowen. (2005). *Management Accounting. Buku 2* (Edisi ke 7 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Desa Jatihurip. (2019). *Profile dan Sejarah Desa*. Kabupaten Sumedang.
- Prayitno, Gunawan, and Aris Subagiyo. (2018). *Membangun Desa: Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Saragih, J. P. (2003). *DESENTRALISASI FISKAL DAN KEUANGAN DAERAH DALAM OTONOMI*. (M. S. Khadafi, Ed.) Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. (2007). *Tahap-tahapan Penelitian Kualitatif Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Yin, R. K. (1996). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

JURNAL

- Afni, I. N. (2017). Akuntansi Keuangan Desa Di Urut Sewu Kabupaten Kebumen.
- Agus, S. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung)*. Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi (Online)*: <http://ovy19.wordpress.com>.
- Aria, G. I. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua)*. Yogyakarta: Digital Library Universitas Sanata Dharma.
- Arista, W. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Wonongan Kabupaten Pasuruan)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang.
- Furqani, A. (2010). *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi pada Pemerintahan Desa Kalimo, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep)*. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur., Surabaya.
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, Vol. 1, No. 1, 15-30.
- Huque, A. (2011). Accountability and Governance: Strengthening extrabureaucratic mechanisms in Bangladesh . *Internasional Journal of Productivity and Performance Management*, Vol. 60(1), 59-74.
- Istiqomah, S. (2015). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 3 No. 1(ISSN 2303-341X), Hal. 118.
- Jatmiko, U. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang menyebabkan Keterlambatan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

- Kholmi, M. (2017). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang). *Journal of Innovation in Business and Economics* 7.2, 143-152.
- Manopo, D. C. (2016). Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi didesa Warisa, Kecamatan Talawan Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Eksekutif*, Vol.1 No.7.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 2 (1), 1-17.
- Miftahuddin. (2018). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*. Yogyakarta: Digital Library Universitas Islam Indonesia.
- Nurul Hidayah, I. W. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabuoaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, Vol 2 Edisi 1, 1-7.
- Pramesti, F. A. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. *Politic and Government Studies*, 7, 1-16.
- Riskasari. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongki Lengkesa Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *Jurnal Office*, Vol. 2.2, 125-132.
- Romantis, P. A. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*. Jember: Universitas Jember.
- Setiawan, Andi, Muhtar Haboddin, dan Nila Febri Wilujeng. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2 No.1(ISSN 2477-8060), Hal. 1-17.
- Siti Ainul Wida, D. S. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – DesaKecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Volume IV (2), 148-152.
- Sri, Lestari, and Lc Waluyo. (2017). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*. Surakarta: Diss. IAIN Surakarta.
- Syahadatina, R. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, Vol. 2.1, 1-18.

Vilmia Farida, A. W. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, Vol. 1 No.1, 64-73.

WEB SITE

Acha. (2018, 12 17). *Gambaran Umum Aplikasi Siskeudes*. Retrieved from Keuangandesas.info: <https://www.keuangandesas.info/2018/12/gambaran-umum-aplikasi-siskeudes.html>

BPKP. (2015, April). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. (tim Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah) Retrieved Maret 21, 2020, from <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesas.pdf?opwvc=1>

Kementerian Keuangan. (2017, November). *Buku Saku Dana Desa*. Retrieved Maret 12, 2020, from <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>

Kementerian Keuangan. (2019, November 19). *Proses Penyaluran Dana Desa*. Retrieved Maret 8, 2020, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-proses-penyaluran-dana-desa/>

Ramadhan, A. (2020, Februari 18). *Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada tahun 2019*. (K. Erdianto, Editor, & KOMPAS) Retrieved Mei 1, 2020, from <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>

Sumarna, A. (2015, 11 30). *Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa*. Retrieved from Keuangandesas.info: <https://www.keuangandesas.info/2015/11/pelaporan-dan-pertanggungjawaban.html>

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Bupati Sumedang No. 81 Tahun 2018. (2018). *Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019*. Sumedang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. (2019, 08 01). *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Retrieved from Kemendagri.go.id.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK no. 199 tahun 2017). (n.d.). *tentang tata cara pengalokasian dana desa setiap kabupaten/kota dan perhitungan rincian dana desa setiap desa*. Retrieved from djpk.kemenkeu.go.id.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019. (n.d.). *Tentang Pengelolaan Dana Desa*. Retrieved from DJPK.Kemenkeu.go.id.

Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri nomor 84 tahun 2015. (n.d.). *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*. Retrieved from panggungharjo.desa.id.

Undang-Undang no. 6 tahun 2014. (n.d.). *Tentang Desa*. Retrieved from dpr.go.id.



IKOPIN